

# **RUANG LINGKUP DAN LUARAN PENELITIAN “HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG”**

Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.  
Ketua Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintah (LPHP)



# STRUKTUR PENELITIAN

## BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian

## BAB II KAJIAN TEORITIK

Teori dan Konsep Negara Hukum, Teori dan Konsep Negara Kesejahteraan, Teori dan Konsep Negara Kesatuan, Teori dan Konsep Otonomi Daerah (Hubungan Pusat dan Daerah), Teori dan Konsep Kedaulatan Rakyat, Kerangka Konseptual Cipta Kerja, Kerangka Konseptual Omnibus Law.

## BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian  
Metode Pendekatan  
Jenis Bahan Hukum  
Teknik Penelusuran Bahan Hukum  
Teknik Analisis Bahan Hukum  
Sistematika Pelaporan Penelitian  
Luaran Penelitian (Out-Put)  
Pelaksana Kegiatan  
Tenaga Ahli Penelitian  
Jadwal Kegiatan  
Desain Penelitian

## BAB IV PEMBAHASAN

## BAB V PENUTUP



# GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN

Desentralisasi dan Otonomi daerah



Hubungan kewenangan  
antara pusat dan daerah



Perlambatan ekonomi pasca penetapan UU  
Cipta Kerja

- 1. Bagaimana perkembangan konfigurasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ?
- 2. Bagaimana perkembangan konfigurasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ?



# ASPEK MUATAN/SUBSTANSI PENELITIAN



**Desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha**

Penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi berbasis elektronik



**Desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah**

Sistem informasi UMKM



**Desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang ketenagakerjaan**

Pengupahan dan pekerja migran



**Desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kemudahan berusaha**

Sistem pajak daerah dan retribusi daerah



# ASPEK MUATAN/SUBSTANSI PENELITIAN



**Desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang dukungan riset dan inovasi**

↳ Inovasi daerah



**Desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pengadaan tanah**

↳ Pertanahan



**Desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang Administrasi Pemerintahan**

↳ Penggunaan direksi oleh pemerintah daerah



**Desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kawasan ekonomi**

↳ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)



**Desain hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional**

↳ Proyek strategis nasional dan administrasi pemerintahan



# LUARAN PENELITIAN (OUT-PUT)

**Kajian  
Akademik**

**Executive  
Summary**

**Mengenai evaluasi hubungan  
antara Pemerintah Pusat dan  
Daerah Pasca Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2023.**





Lembaga  
Pengembangan  
Hukum  
Pemerintahan



**SEKIAN DAN  
TERIMAKASIH**

